

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA PIK (PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN) DI KELURAHAN BULIANG KECAMATAN BATU AJI BATAM

IMPLEMENTATION OF PIK FUND POLICY (VILLAGE INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT) IN BULIANG VILLAGE, BATU AJI DISTRICT, BATAM

Indah Wani Butar Butar1)* , Riko Riyanda2*), Lara Indah Yandri3*),
1), 2), 3)*Program Studi Ilmu Politik, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
riyanda.fisip@gmail.com,laraindahyandri@gmail.com

Abstrak :Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan soal dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) dijumpai pada kurangnya dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. Kurangnya dana membuat tim pelaksana untuk melakukan pembangunan secara bergiliran, oleh karenanya Partisipasi masyarakat berupa materi atau pembayaran uang kas Swadaya Masyarakat dan gotong royong sangat membantu memsuksesnya implementasi dana PIK di kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) Di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, proses implemmentasi kebijakan yang dimulai dari tahap penyusunan rencana kegiatan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), tahap pelaksanaan dan penyelesaian, kepatuhan atas suatu kebijakan dan efek atau dampak dari implementasi. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan swadaya gotong royong dan masyarakat memberikan bantuan dana pembangunan melalui Swadaya Masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Dana, PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan)

Abstract:

The issue in this research is the implementation of the PIK (Kelurahan Infrastructure Improvement) fund policy, which faces obstacles due to insufficient funds provided by the local government. The lack of funding forces the implementation team to carry out development projects in rotation. Therefore, community participation in the form of contributions or voluntary community funds and mutual cooperation (gotong royong) greatly contributes to the successful implementation of PIK funds in Buliang Sub-district, Batu Aji District, Batam City. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of PIK funds in Buliang Sub-district, Batu Aji District. The results of this research show that the implementation of PIK funds in Buliang Sub-district, Batu Aji District, Batam City, has been running well. This can be seen from the parties involved in policy implementation, the policy implementation process starting from the planning stage through Musrenbang (Development Planning Forum), the implementation and completion stages, compliance with policies, and the effects or impacts of the implementation. This is evident in the community's self-help activities and mutual cooperation, including financial support provided through community self-help initiatives.

Keywords: Implementation, policy, funds, PIK (Kelurahan Infrastructure Improvement)

A. PENDAHULUAN

Untuk pencapaian pelaksanaan tujuan pembangunan, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap wilayah untuk mengatur, mengurus dan meningkatkan pembangunan daerahnya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Muluk, 2011: 69). Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. (Anggara, 2012:39).

Pemerintah Walikota Batam menerapkan Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) Kota Batam yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur Kelurahan yaitu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dana Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) yang dirasionalisasikan kepada setiap Kelurahan merupakan dana murni dari dana daerah atau APBD. Berbeda dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang anggarannya dari Pemerintah Pusat.

Ada beberapa dampak kebijakan PIK terhadap partisipasi masyarakat yaitu, semakin meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan Forum Musrenbang baik Desa/Kecamatan, semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Forum Musrenbang, perencanaan pembangunan lebih membidik persoalan real lapangan, masyarakat semakin kritis terhadap hak dan kewajibannya dalam pembangunan daerah (<http://dokument.tips/documents-ekspose-kebijakan-Pik-Bandung-Barat.html>).

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam. Menurut PERWAKO (Pemerintah Walikota) Batam pasal 4 tujuan program PM- PIK Kota Batam adalah pelaksanaan pembangunan dengan peran serta aktif/pemberdayaan masyarakat dan sebagai stimulan kemandirian masyarakat, terutama dalam hal pembangunan/penyediaan infrastruktur lingkup Kelurahan.

Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, pemerintah daerah melakukan akselerasi pembangunan sampai ke tingkat kelurahan dalam bentuk penguncuran dana PIK. Penguncuran dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) Kota Batam telah terlaksana dalam 2 tahun terakhir. Implementasi dana PIK di Kelurahan Buliang telah dirasionalisasikan dengan baik dan efektif. Di dalam pelaksanaan program PIK di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam masih terdapat masalah yaitu kurangnya dana dalam pembangunan. Akan tetapi hal itu dapat diatasi yaitu dengan adanya dana dari Swadaya Masyarakat. Pada

Tabel 1.Rekapitulasi Data Dana Program PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2015

No	Kegiatan	RW (Rukun Warga)	Jumlah
1	Drainase	RW 04	Rp 50.000.000.00
2	Drainase	RW 05	Rp 50.000.000.00
3	Semenisasi Jalan	RW 07	Rp 50.000.000.00
4	Parit Lingkungan	RW 22	Rp 50.000.000.00
5	Semenisasi Jalan	RW 29	Rp 50.000.000.00
Jumlah			Rp 250.000.000.00

Sumber: BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Buliang.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di atas dapat dilihat bahwa dari 30 RW (Rukun Warga) hanya 5 RW (Rukun Warga) yang mendapat pembangunan infrastruktur berupa semenisasi jalan, drainase/buat parit, parit lingkungan. Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) dijumpai pada kurangnya dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. Kurangnya dana membuat tim pelaksana untuk melakukan pembangunan secara bergiliran yaitu dengan mendahulukan yang lebih prioritas sehingga tidak ada kecemburuan dari masyarakat yang belum mendapat giliran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini sangat membantu terlaksananya pembangunan. Partisipasi masyarakat berupa materi atau pembayaran uang kas Swadaya Masyarakat, gotong royong.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan peneliti.

Menurut (Sugiono 2018) dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan selain menggunakan orang sebagai alat penelitian utama. Alasannya, semuanya belum final, dan pertanyaan penelitian kunci, proses penelitian, asumsi yang digunakan, dan bahkan hasil yang diharapkan tidak dapat

ditentukan dan dibuat jelas sebelumnya. Semuanya masih perlu dikembangkan selama proses penelitian. Dalam situasi ketidakpastian dan ketidakjelasan total, tidak ada pilihan selain menjadi satu-satunya alat yang diakui oleh para peneliti sendiri. Penelitian kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data bukan sebagai mana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagai mana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan di fikirkan oleh partisipasi /sumber data. Menurut Sugiyono (2014: 7) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan peneliti (Robert K Yin 2013). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Batam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*). Disini peneliti mengarahkan pertanyaan terkait dengan data yang diinginkan. Wawancara nantinya akan diarahkan kepada Kepala Lurah, Ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Pokjamas (Kelompok Kerja Masyarakat), Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interpretasi etik dan emik dimana pengetahuan peneliti tentang permasalahan penelitian akan diadu dengan informasi yang disampaikan informan berupa pendapat dan informasi dari diri sendiri. Adapun tahapan penelitian ini, yaitu; a. studi literatur, b. pengumpulan data primer dan sekunder, c. analisa data, d. penyajian data, e. penarikan kesimpulan.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab (Anggara, 2012: 530) sebagaimana suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. Pemerintah Kota Batam membuat program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan daerah. Implementasi dana PIK (Peningkatan infrastruktur Kelurahan) diatur dalam Peraturan Walikota Batam No. 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.

Secara umum pelaksanaan Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) telah berjalan dengan efektif. Paramaterya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dana PIK Melibatkan Stakeholder Lapisan Masyarakat

Stakeholder memainkan peranan penting dalam implementasi Dana PIK ini berjalan efektif, diantara stakeholder yang terlibat adalah: Lurah, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan, Pokjamas, RW/RT, dan seluruh masyarakat terlibat dalam program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang. Berdasarkan pendapat Van Metter dan Van Horn (Anggara, 2014: 232) yang menyatakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Namun apabila dikaitkan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn, orang-orang yang terlibat dalam implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) adalah Lurah sebagai pengawas, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pengawas, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Pokjamas (Kelompok Kerja Masyarakat), dan masyarakat. Dalam proses implementasi peran para tim pelaksana dan masyarakat sangatlah penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Proses implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Melalui Porsedur Musrenbang

penyusunan rencana kegiatan program dana PIK telah dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Penyusunan rencana kegiatan sangat diperlukan dalam proses implementasi karena hal ini membantu para tim pelaksana untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan, penyusunan rencana kegiatan dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang dihadiri oleh tim pelaksana dan masyarakat. Dalam rapat ini masyarakat berhak memberikan keluhan-keluhan dan masukan mengenai peningkatan pembangunan. Keluhan dan masukan masyarakat diterima oleh para tim pelaksana dan ditanggapi dengan baik. Dalam penyusunan rencana kegiatan yang prioritaslah yang didahulukan.

3. Pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan program dana PIK, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan program dana PIK telah diselesaikan semuanya. Pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan program dana PIK telah berjalan dengan baik dan efektif. Meskipun ada kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana tetapi dapat diatasi oleh tim pelaksana. Masyarakat yang mendapat giliran dalam pembangunan membayar dana Swadaya Masyarakat dan masyarakat tidak keberatan dengan hal tersebut. Partisipasi masyarakat dalam membayar Swadaya Masyarakat sangat penting dalam pembangunan dan masyarakat berharap pembangunan infrastruktur Kelurahan berlangsung untuk tahun-tahun berikutnya.

4. Kepatuhan tim pelaksana atas suatu kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Hasil penelitian terhadap kepatuhan atas suatu kebijakan menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksanaan atas suatu kebijakan program dana PIK di kelurahan Buliang sesuai dengan hasil kesepakatan musrenbang. Tidak ada kendala berarti karena tim pelaksana dapat berkoordinasi dan bekerjasama agar program ini bisa berjalan efektif mungkin sehingga manfaatnya nanti dapat dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Buliang. Karena bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan yang perlu diprioritaskan untuk dikerjakan sesegeranya oleh tim pelaksana yang sudah dibentuk dan disepakati sebelumnya.

5. Efek dan dampak dari implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Hasil penelitian terhadap efek dan dampak dari implementasi program dana PIK ini sangat besar salah satu manfaatnya adalah penanggulangan banjir dan peningkatan pembangunan. Dengan adanya program dana PIK (Peningkatan infrastruktur Kelurahan) yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan daerah dapat dirasakan masyarakat. Masyarakat sangat antusias dengan program ini karena sangat membantu dalam hal pembangunan dan masyarakat berharap program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) dapat berjalan untuk tahun-tahun berikutnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi antara tim pelaksana dan masyarakat

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan yang akan disampaikan dapat dipahami oleh penerima pesan. Hasil penelitian mengenai faktor komunikasi mendapat pernyataan dari Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa komunikasi antara tim pelaksana dengan masyarakat berjalan dengan lancar, dalam penyampaian informasi tim pelaksana melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti tentang dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) dan tujuan diadakannya program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan).

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukan adalah faktor komunikasi. Menurut Edward III (Tahir, 2015: 62) menegaskan: Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

2. Sumber daya dalam implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan), karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dalam hal sumber daya para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

Sumber daya manusia di Kelurahan Buliang rata-rata berpendidikan Sarjana. Sehingga dalam implementasi program dana PIK tim pelaksana ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penempatan para tim pelaksana sesuai dengan keahliannya akan mempermudah implementasi kebijakan karena para tim pelaksana sudah mengetahui apa yang harus dilakukan/dikerjakan.

3. Sikap pelaksana dalam implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Implementasi program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal sikap pelaksana memiliki sikap ramah dan respon terhadap masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik. Menurut Edward III (Tahir, 2015: 68) menegaskan: sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Berdasarkan pendapat Edward tersebut sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi sebuah kebijakan.

Ketika seorang tim pelaksana hanya meninggikan atau menyombongkan otoritasnya maka implementasi sebuah kebijakan tidak berjalan dengan baik sehingga dibutuhkan para tim pelaksana yang mengerti dengan kondisi dilingkungannya. Di Kelurahan Buliang tim pelaksana sikapnya ramah dan mau mendengarkan keluhan-keluhan dan masukan-masukan dari masyarakat dan tim pelaksana melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan.

4. Struktur birokrasi program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang

Dalam hal struktur organisasi pelaksana program dana PIK (peningkatan Infrastruktur Kelurahan) bahwa struktur organisasi dibentuk melalui voting dan musyawarah dengan masyarakat, dan setiap pelaksana ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Edward III (Tahir, 2015: 70) menjelaskan: meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh efisiensi struktur birokrasi. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Pembentukan struktur organisasi program dana PIK dibentuk melalui musyawarah dan *voting* dari masyarakat. Hal ini disetujui oleh Kepala Lurah Kelurahan Buliang. Pembagian Tugas dan fungsinya ditentukan sesuai dengan kedudukan masing-masing para pelaksana. Dalam mengimplementasikan kebijakan struktur birokrasi turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, karena kebijakan yang baik tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran dari semua pelaksana yang telah dipilih sehingga diharapkan kepada seluruh pelaksana dan masyarakat untuk melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun simpulan yang didapat adalah:

1. Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan yang dimulai dari tahap penyusunan rencana kegiatan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), tahap pelaksanaan dan penyelesaian, kepatuhan atas suatu kebijakan dan efek atau dampak dari

implementasi. Hasil dari kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) adalah Drainase/buat parit di RW 04 dan RW 05, semenisasi jalan RW 07 dan RW 29, dan Parit lingkungan RW 29. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan swadaya gotong royong dan masyarakat memberikan bantuan dana pembangunan melalui Swadaya Masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana PIK (Program Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam adalah
 - a. Faktor komunikasi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi antara tim pelaksana dengan masyarakat berjalan dengan lancar yaitu melalui sosialisasi.
 - b. Faktor sumber daya, Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan. Sumber daya dalam kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) rata-rata berpendidikan Sarjana.
 - c. Faktor sikap pelaksana, sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Sikap pelaksana dalam kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam ramah dan tanggap terhadap keluhan-keluhan dan masukan-masukan dari masyarakat.
 - d. Faktor Struktur Birokrasi, struktur birokrasi dibentuk supaya para pelaksana mengetahui apa tugas dan fungsinya. Struktur birokrasi dalam kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dibentuk melalui musyawarah dan voting dari masyarakat dan terbentuklah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam pada masa mendatang. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan program dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) lebih ditingkatkan yaitu dengan melakukan sosialisasi sekali dalam sebulan supaya masyarakat lebih memahami tentang dana PIK.
2. Membuat kerangka kerja kebijakan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.
3. Mengadakan evaluasi dari hasil implementasi dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan).
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam peningkatan pembangunan Kelurahan Buliang dengan mengadakan berbagai kegiatan misalnya gotong royong yang dilakukan setiap seminggu sekali dan kegiatan kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

E. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. CV PUSTAKA SETIA. Bandung.
- Anggara, Sahya. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. Cetakan Pertama. CV PUSTAKA SETIA. Bandung.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. CV PUSTAKA SETIA. Bandung.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Islamy, Irfan. (2014). *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Muluk, Khairul. (2011). *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. ITS Press. Surabaya.
- Pasalong, Harbani. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Rosidin, Utang. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV PUSTAKA SETIA. Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-21. Alfabeta. Bandung.

Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. ALFABETA. Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. UMM Press. Malang.

Jurnal dan Website

Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2015). *Kecamatan Batu Aji Dalam Angka 2015*. Batam. 17-25.

Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 4 (2).

Sanusi, DB. Paranoan, Achmad Djumlani. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *ejournal Administrative Reform*. 2 (3): 1732 – 1745.

Sumiati, Intan. (2013). Implementasi Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap). *ejournal pemerintahan Integratif*. 1 (1): 28 – 36.

Wahana, Ardi Sukma. (2015). Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Di kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. *ejournal Ilmu Pemerintahan*. 3 (2): 1167 – 1181.

Waluyo. (2014). Kebijakan Penyusunan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Rangka Integrasi Pembangunan Daerah Tahun 2014. Bandung Barat. <http://dokument.tips/documents-ekspose-kebijakan-Pik-Bandung-Barat.html>. 10 Oktober 2016

Peraturan Kebijakan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Walikota Batam No. 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Regulasi Revisi dari Undang-Undang 22 Tahun 1999, dan Revisi Baru Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.